



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8932-8944

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Indeks Kapasitas Fiskal Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Belanja Sosial Di Kabupaten/Kota Jawa Bali Tahun 2018-2020

Tharisyta Setya Pusparini^{1✉}, Heppy Purbasari²

Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: tharisyasyapusparini@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama makro ekonomi suatu negara, terutama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh indeks kapasitas fiskal terhadap tingkat kemiskinan melalui belanja sosial sebagai variabel intervening. Dengan menggunakan sampel Kabupaten/Kota Jawa-Bali untuk periode 2018-2020 diperoleh hasil sebagai berikut indeks kapasitas fiskal berpengaruh terhadap belanja sosial, indeks kapasitas fiskal berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, belanja sosial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, dan belanja sosial tidak dapat memediasi indeks kapasitas fiskal terhadap tingkat kemiskinan.

Kata Kunci : *Indeks Kapasitas Fiskal, Tingkat Kemiskinan, dan Belanja Sosial*

Abstract

Poverty is one of the main macroeconomic problems of a country, especially in Indonesia. This study aims to determine whether or not the fiscal capacity index has a significant effect on the poverty rate through social spending as an intervening variable. By using a sample of Java-Bali Regency / City for the 2018-2020 period, the following results were obtained: the fiscal capacity index affects social spending, the fiscal capacity index affects the poverty rate, social spending has no effect on the poverty rate, and social spending cannot mediate the fiscal capacity index on the poverty rate.

Keywords: *Fiscal Capacity Index, Poverty Level, and Social Spending*

PENDAHULUAN

Kemiskinan, inflasi tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lemah adalah tantangan ekonomi umum di negara-negara berkembang. Hal ini juga berlaku di Indonesia, sebuah negara dengan jumlah penduduk yang besar, tetapi tingkat pertumbuhannya relatif rendah (Ningsih & Andiny, 2018). Kemiskinan berasal dari kata "miskin," yang menggambarkan kekurangan aset dan kondisi yang menghambat seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan (Rauf, 2019).

"Selama periode September 2017 hingga Maret 2018, terjadi penurunan jumlah penduduk yang berada dalam kondisi kekurangan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa sekitar 128,2 ribu individu keluar dari kategori penduduk miskin (mengurangi jumlahnya dari 10,27 juta pada bulan September 2017 menjadi 10,14 juta pada bulan Maret 2018). Di daerah perdesaan, penurunan jumlah penduduk miskin lebih signifikan, dengan sekitar 505 ribu orang keluar dari kondisi tersebut (mengurangi dari 16,31 juta pada bulan September 2017 menjadi 15,81 juta pada bulan Maret 2018). Pada bulan Maret 2019, terlihat penurunan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan menjadi sekitar 6,69%, yang merupakan turun dari angka 6,56% pada bulan September 2019. Sementara itu, proporsi penduduk miskin di daerah perdesaan juga mengalami penurunan, turun dari 12,85% pada bulan Maret 2019 menjadi sekitar 12,60% pada bulan September 2019. Pada bulan Maret 2020, terjadi kenaikan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan, mencapai sekitar 7,38%, yang kemudian meningkat menjadi sekitar 7,88% pada bulan September 2020. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan mencapai sekitar 12,82% pada bulan Maret 2020, yang juga mengalami kenaikan menjadi sekitar 13,20% pada bulan September 2020 (BPS, 2020).

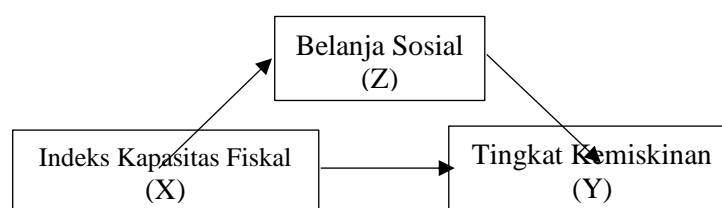
Menurut Pratama (2022), ada beberapa faktor yang menjadi pendorong kemiskinan, termasuk rendahnya tingkat upah minimum, standar hidup masyarakat yang terbatas, ketidakstabilan ekonomi, dan tingginya tingkat inflasi. Dampak dari kemiskinan ini berimbas pada stagnasi pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah perlu memberikan bantuan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Beberapa faktor, seperti tingkat pendapatan, akses pendidikan, kesehatan, pelayanan, dan letak geografis, berperan dalam meningkatkan angka kemiskinan di suatu wilayah, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat keamanan individu (Fadila & Marwan, 2020). Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang erat kaitannya dengan cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari.

Menghadapi ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi, pemerintah berinisiatif memberikan subsidi anggaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merangsang perkembangan ekonomi (Edna Safitri et al., 2022). Upaya pemerintah untuk mendukung warga yang kurang mampu dapat mencakup bantuan finansial langsung, penyediaan peralatan kesehatan dasar, subsidi perumahan, bantuan pangan, dan berbagai program lainnya (Rauf, 2019).

Pemerintah mengimplementasikan program subsidi, baik dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) maupun belanja bantuan sosial, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Belanja sosial merupakan kategori belanja pemerintah yang menyediakan dana atau barang kepada warga yang membutuhkan. Selain itu, peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam keuangan daerah menjadi tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Semakin besar PAD yang diperoleh dan dipungut oleh suatu daerah, semakin besar pula pendapatan daerah yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Limpele et al., 2021). Kapasitas fiskal daerah mencerminkan kemampuan keuangan masing-masing daerah, berdasarkan pendapatan umum APBD, namun tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), dana darurat, dana pinjaman lama, dan pendapatan lain yang digunakan untuk tujuan tertentu (Bawono et al., 2017).

Kapasitas fiskal yang kurang memadai dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga lainnya, serta berkontribusi pada ketidakpuasan dan ketidakpercayaan, terutama di kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah (Rauf, 2019). Meskipun kapasitas fiskal yang tinggi seharusnya dapat membantu mengatasi kemiskinan di berbagai daerah, pada kenyataannya, hal ini saja tidak selalu cukup untuk mengurangi angka kemiskinan di suatu wilayah (Adriawan et al., 2022).

Kerangka Penelitian



Hipotesis Penelitian

Hipotesis berisi dugaan yang memiliki kemungkinan benar atau juga salah (Sutrisno, 1983). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

H₁ : Indeks Kapasitas Fiskal berpengaruh terhadap Belanja Sosial

H₂ : Indeks Kapasitas Fiskal berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan

H_3 : Belanja Sosial berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan

H_4 : Indeks Kapasitas Fiskal dan Belanja Sosial berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kuantitatif, termasuk pengujian hipotesis. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang menitikberatkan pada pengukuran variabel-variabel penelitian dan analisis data melalui proses statistik. Populasi penelitian mencakup kabupaten dan kota di wilayah Jawa dan Bali, yang terdiri dari total 122 entitas, terdiri dari 93 kabupaten dan 29 kota. Metode purposive sampling diterapkan untuk memilih sampel yang representatif berdasarkan kriteria tertentu. Beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel meliputi:

1. Lokasi kabupaten dan kota yang mencakup wilayah Jawa dan Bali.
2. Kabupaten dan kota yang memiliki data statistik terkait indeks kapasitas fiskal, belanja sosial, dan tingkat kemiskinan dari periode 2018 hingga 2020

Tabel 1. Definisi Operasional Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Sumber Referensi
Variabel Dependen		
Tingkat Kemiskinan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z-y_i}{z} \right] \alpha$	Persentase Penduduk Po (BPS)
Variabel Independen		
Indikator Kapasitas Fiskal	$KF = \frac{\sum (PAD + DAU + DBH + Otsus + Transfer Prov + LP) - BP}{Jumlah\ Penduduk\ Miskin}$ $IKF = \frac{\sum KF}{Jumlah\ Provinsi\ dan\ Kab/Kota}$	Peraturan Menteri Keuangan
Variabel Intervening		

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kerangka survei ini, populasi yang menjadi objek penelitian meliputi 122 kabupaten dan kota di wilayah Jawa dan Bali, terdiri dari 93 kabupaten dan 29 kota. Penentuan sampel dilakukan melalui pendekatan purposive sampling, yang menghasilkan 339 sampel dalam jangka waktu tiga tahun. Terdapat 5 kabupaten dan 4 kota yang tidak memenuhi kriteria, sehingga sampel penelitian yang sesuai dengan kriteria adalah sebanyak 113 entitas per tahun. Penelitian ini dilakukan selama periode tiga tahun, mulai dari tahun 2018 hingga 2020, sehingga jumlah total sampel penelitian mencapai 335 kabupaten dan kota.

1. Uji Asumsi Klasik

1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji CLT (Central Limit Theorem), yang menyatakan bahwa jika jumlah observasi cukup besar ($n > 30$), maka asumsi normalitas dapat dibuang (Gujarati, 2003). Jumlah total partisipan dalam penelitian ini adalah $335 > 30$. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi secara teratur dan mewakili sampel yang besar.

1.2 Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas pada persamaan satu memberikan nilai tolerance sebesar $1 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar 1 yang menunjukkan 1 10. Uji multikolinearitas untuk persamaan 1 kemudian dinyatakan lolos, yang mengindikasikan tidak terjadi multikolinearitas. Variabel indeks kapasitas fiskal menghasilkan nilai tolerance sebesar 0,924 dan nilai VIF sebesar 1,082 untuk persamaan dua yang terdiri dari variabel independen indeks kapasitas fiskal dan belanja sosial dan variabel dependen tingkat kemiskinan, dan variabel belanja sosial menghasilkan nilai tolerance sebesar 0,924 dan nilai VIF sebesar 1,082 yang mengindikasikan tidak terjadi multikolinearitas.

1.3 Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode Spearman Rho. Hasilnya menunjukkan bahwa persamaan pertama, yang

terdiri dari variabel independen indeks kapasitas fiskal dan variabel dependen belanja sosial, memberikan nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,910. Nilai ini menggambarkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas dalam data. Selanjutnya, persamaan kedua, dengan variabel indeks kapasitas fiskal dan belanja sosial, memberikan nilai signifikansi (2-tailed) masing-masing sebesar 0,738 dan 0,607. Hasil ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat tanda-tanda heteroskedastisitas dalam data.

1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dalam penelitian ini. Ketika nilai Durbin-Watson (DW) berada dalam rentang -2 hingga 2, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam data (Santoso: 2012). Hasil analisis pada persamaan pertama menunjukkan bahwa variabel independen indeks kapasitas fiskal dan variabel dependen belanja sosial menghasilkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,933, yang menggambarkan ketiadaan autokorelasi. Sedangkan pada persamaan kedua, nilai Durbin-Watson adalah sebesar 1,135, menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam data.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2. Analisis Regresi Linier Berganda

	Variabel	Unstandardized Coefficients B	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
Persamaan 1	Indeks Kapasitas Fiskal	0.377	0.275	5.228	.000
Persamaan 2	Indeks Kapasitas Fiskal	0.634	-0.137	2.246	.016
	Belanja Sosial	-0.038	-0.011	0.197	.844

Sumber : Hasil Analisis Olah Data, 2023

Persamaan 1 :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{ IKF} + e$$

$$\text{BS} = 21,641 + 0,377 \text{ IKF}$$

Persamaan 2 :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{ IKF} + \beta_2 \text{ BS} + e$$

$$\text{TK} = 12,688 - 0,634 \text{ IKF} - 0,038 \text{ BS}$$

3. Uji Hipotesis

3.1 Koefisien Determinasi (R Square)

Dalam penelitian ini, variabel independen, yaitu indeks kapasitas fiskal, dan variabel dependen, yaitu belanja sosial, menghasilkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,073 atau setara dengan 7,3%. Hasil ini menunjukkan bahwa indeks kapasitas fiskal mampu menjelaskan sebanyak 7,3% variasi dalam belanja sosial, sementara sebanyak 92,7% variasi sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Demikian pula, Adjusted R Square pada persamaan kedua adalah sebesar 0,14 atau setara dengan 1,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel indeks kapasitas fiskal dan belanja sosial dapat menjelaskan hingga 98,6% variasi dalam tingkat kemiskinan, sedangkan faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini menjelaskan sebagian sisanya sebesar 1,4%.

3.2 Uji T

Dalam penelitian ini persamaan satu memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ maka terdapat adanya pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal terhadap Belanja Sosial. Pada persamaan dua yang memiliki nilai signifikansi $< 0,05$, yaitu Indeks Kapasitas Fiskal yang berarti adanya pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan.

3.3. Uji F

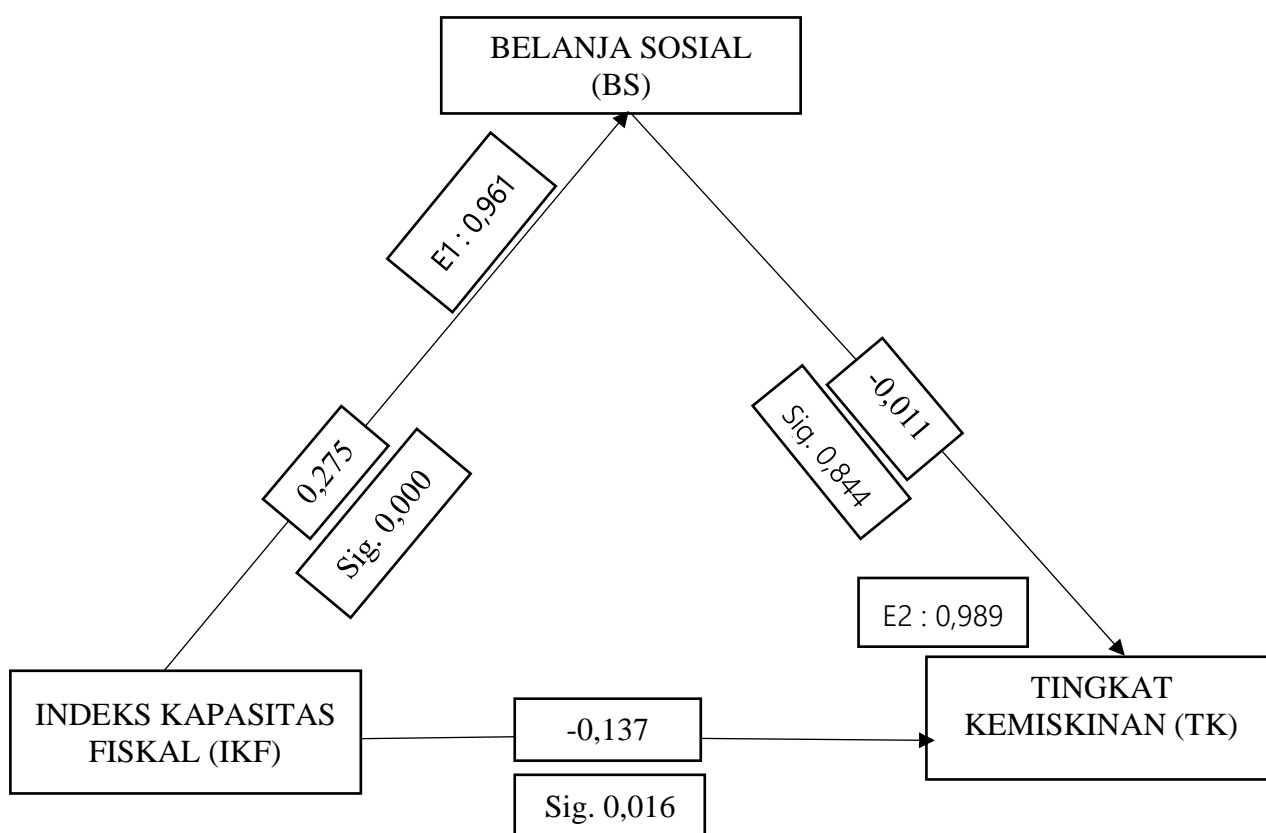
Tabel 3. Hasil Uji F

	Variabel	F	Sig.
Persamaan 1	Indeks Kapasitas Fiskal	27.327	0.000
Persamaan 2	Indeks Kapasitas Fiskal, Belanja Sosial	3.348	0.036

Sumber: Hasil Analisis Olah Data, 2023

Dalam penelitian ini persamaan satu dan dua menunjukkan nilai signifikansi F kurang dari 0,05 yang berarti model penelitian ini fit.

4. Analisis Jalur (Path Analysis)



Hasil Interpretasi Analisis Jalur (Path Analysis)

1. Pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal terhadap Belanja Sosial.

Terdapat suatu pengaruh langsung yang ditemukan, yaitu indeks kapasitas fiskal memberikan kontribusi sebesar 0,275 dengan signifikansi 0,005 terhadap belanja sosial. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Indeks Kapasitas Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Belanja Sosial.

Dengan demikian dapat disimpulkan H_1 diterima.

2. Pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan

Diketahui bahwa Indeks Kapasitas Fiskal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,016, yang berarti kurang dari 0,05 atau 5%. Hasil ini mengindikasikan bahwa secara parsial, variabel Indeks Kapasitas Fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Dengan demikian dapat disimpulkan H_2 diterima.

3. Pengaruh Belanja Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan

Diketahui bahwa Belanja Sosial memiliki nilai signifikansi sebesar 0,884, yang lebih besar

dari 0,05 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel Belanja Sosial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Dengan demikian dapat disimpulkan H_3 ditolak.

4. Pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Sosial

Dalam analisis pengaruh langsung Indeks Kapasitas Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan, ditemukan nilai sebesar (-0,137). Sementara itu, pengaruh tidak langsung Indeks Kapasitas Fiskal melalui Belanja Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan dihitung sebagai hasil perkalian antara nilai beta (indeks kapasitas fiskal terhadap tingkat kemiskinan) dengan nilai beta (belanja sosial terhadap tingkat kemiskinan), yaitu sebesar $0,275 \times (-0,011) = -0,003$.

Berdasarkan perhitungan di atas, pengaruh langsung sebesar (-0,137) lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung sebesar -0,003. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung Indeks Kapasitas Fiskal melalui Belanja Sosial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Dalam hal ini, Belanja Sosial tidak mampu berperan sebagai mediator antara Indeks Kapasitas Fiskal dan Tingkat Kemiskinan.

Dengan demikian dapat disimpulkan H_4 ditolak.

5. Uji Sobel (*Sobel Test*)

Pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal (X) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) melalui Belanja Sosial (Z).

Diketahui:

$$a = 0,377$$

$$b = -0,038$$

$$Sa = 0,072$$

$$Sb = 0,191$$

$$Sab = \sqrt{b^2sa^2 + a^2sb^2 + sa^2sb^2}$$

$$Sab = \sqrt{(-0,038)^2 0,072^2 + 0,377^2 0,191^2 + 0,072^2 0,191^2}$$

$$Sab = \sqrt{0,00000728 + 0,00518665 + 0,0001898}$$

$$Sab = \sqrt{0,00538373}$$

$$Sab = 0,0733739054432841$$

$$t = \frac{ab}{sab}$$

$$t = \frac{0,0143}{0,0733739054432841}$$

$$t = 0,1948921747262518$$

Hasil uji Sobel pada analisis mediasi menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,1948921747262518. Sementara nilai t tabel yang sesuai dengan alpha 0,05 adalah sebesar

1,96713. Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa t hitung $<$ t tabel. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah variabel Belanja Sosial (Z) tidak berperan sebagai mediator dalam memediasi pengaruh antara variabel Indeks Kapasitas Fiskal (X) dan Tingkat Kemiskinan (Y).

Pembahasan Hipotesis

1. Pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal terhadap Belanja Sosial

Diketahui bahwa indeks kapasitas fiskal terhadap belanja sosial memiliki nilai signifikansi sebesar 0,275, yang berarti kurang dari 0,05 atau 5%. Ini mengindikasikan bahwa secara parsial, variabel Indeks Kapasitas Fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Sosial. Kapasitas fiskal daerah di Jawa dan Bali memiliki tingkat yang cenderung tinggi, memungkinkan Kabupaten dan kota mendukung belanja sosial. Semakin tinggi kapasitas fiskal suatu daerah, semakin besar kemampuannya dalam mengalokasikan belanja pada sektor-sektor lainnya. Kapasitas fiskal yang tinggi pada tingkat kabupaten atau kota memungkinkan mereka untuk membiayai dan mengalokasikan belanja ke sektor-sektor lain.

Dengan demikian H1 diterima.

2. Pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan analisis uji T, terdapat bukti statistik yang kuat bahwa indeks kapasitas fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Rauf (2019) yang menunjukkan bahwa kapasitas fiskal masing-masing daerah memiliki dampak pada tingkat kemiskinan. Secara konsisten, peningkatan kapasitas fiskal diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan. Untuk meningkatkan kapasitas fiskal, pemerintah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber belanja daerah.

Dengan demikian H2 diterima

3. Pengaruh Belanja Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan

Diketahui bahwa pengaruh Belanja Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,884, yang lebih besar dari 0,05 atau 5%. Ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel Belanja Sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Sendouw et al. (2019) yang menunjukkan bahwa belanja sosial tidak memiliki dampak signifikan pada tingkat kemiskinan. Hal ini juga sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh Firmansyah (2019), yang menyatakan bahwa bantuan sosial belum mampu mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial, terutama karena manfaat yang diberikan relatif rendah dan tidak mampu membantu penduduk miskin untuk keluar dari garis kemiskinan.

Dengan demikian H3 ditolak

4. Pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal dan Belanja Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan

Indeks Kapasitas Fiskal terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, sejalan dengan temuan penelitian oleh Franciari & Sugiyanto (2013), yang menunjukkan bahwa semakin besar kemampuan fiskal suatu daerah, semakin rendah tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Untuk meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah, PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dapat ditingkatkan melalui upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, sumber pajak pun berkembang, yang pada gilirannya meningkatkan PAD. Telah teridentifikasi bahwa Belanja Sosial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Melati dkk. (2021), yang menunjukkan bahwa manfaat dan dampak yang diberikan oleh Belanja Sosial sangat terbatas dan tidak mampu membantu masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan. Penyebab lainnya adalah kesulitan pemerintah dalam mengidentifikasi masyarakat miskin dan dalam menentukan penerima bantuan sosial yang tepat.

Akibatnya, H4 ditolak.

SIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa dan Bali pada tahun 2018-2020, dengan menggunakan Belanja Sosial sebagai variabel intervening, Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil Uji F atau pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Indeks Kapasitas Fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan sebesar 0,10 lebih kecil dari 0,05.
2. Hasil Uji T
 - a. Indeks Kapasitas Fiskal berpengaruh terhadap Belanja Sosial.
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.
 - c. Belanja Sosial tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.
 - d. Belanja Sosial tidak dapat memediasi Indeks Kapasitas Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan

A. Keterbatasan Penelitian

Ada banyak batasan studi berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh pada bab sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali dengan periode yang digunakan selama 3 tahun 2018-2020.
2. Penelitian ini menggunakan Belanja Sosial sebagai variabel Intervening yang belum banyak menghasilkan literatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriawan, R., Rahman, A., & Iwang, B. (2022). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1), 226–234. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10750>
- Bawono, A. D. B., Fauzan, F., Kusumawati, E., & Purbasar, H. (2017). Analisis Indeks Kapasitas Fiskal terhadap Pengalokasian Belanja Wajib Bidang Pendidikan dan Kesehatan (Studi pada Kabupaten/Kota se-Jawa). *The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang*, 87–92.
- Edna Safitri, S., Triwahyuningtyas, N., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 259–274. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.30>
- Fadila, R., & Marwan, M. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018. *Jurnal Ecogen*, 3(1), 120. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i1.8531>
- Franciari, P. S., & Sugiyanto, F. X. (2013). Analisis Hubungan IPM, Kapasitas Fiskal, dan Korupsi Terhadap Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2008 dan 2010). *Diponegoro Journal Of Economics*, 2(2), 1–14. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>
- Limpele, J. J., Rotinsulu, D. C., & Rorong, I. P. F. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kapasitas Fiskal Provinsi Sulawesi Utara. *Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(1), 84–99. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/34326%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/download/34326/32280>
- Melati, A. M., Sudrajat, & Burhany, D. I. (2021). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 422–430.
- Ningsih, D., & Andiny, P. (2018). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap

Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 2(1), 53–61.

Pratama, Y. C. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia. *ESENSI*, 4(2), 45–53. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966>

Rauf, A. A. (2019). Kapasitas Fiskal dan PDRB dengan Tingkat Kemiskinan: Studi pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. *E-Jurnal Katalogis*, 4(10), 64–81.

Sendouw, A., Rumat, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2019). Pengaruh Belanja Modal, Belanja Sosial, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 1–15. <https://doi.org/10.35794/jpekd.15780.19.2.2017>